

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur dari negara adalah adanya penduduk yang memiliki kebutuhan beragam–ragam dalam kehidupannya oleh karena itu pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang dicapai oleh pemerintah tersebut. Oleh karena itu, kinerja pemerintah menjadi sangat penting untuk diukur dan dilihat. Peran ini membuat pemerintah harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan efektivitas kerjanya. Terealisasinya suatu program atau agenda untuk mencapai target dan sasaran menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja pemerintah, di mana anggaran merupakan salah satu komponen utamanya.

Anggaran didefinisikan sebagai rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter dan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi 2001:488). Selain sebagai rencana kerja kuantitatif, anggaran juga memiliki beberapa peran penting antara lain sebagai alat

stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang semakin efektif dan efisien akan menyebabkan peningkatan kinerjanya yang semakin tinggi.

Negara Indonesia menetapkan anggaran negaranya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya dilakukan penepatan dengan undang-undang setelah mendapatkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pentingnya peran anggaran menjadikan semua anggaran yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling utama.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan serta memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa LRA merupakan laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang terealisasi melalui estimasi pendapatan dan belanja dengan pagu anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hingga pada Tahun 2021, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang terjangkit wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini sangat

memberikan dampak yang besar bagi APBN negara kita, dimana APBN negara kita mengalami guncangan, baik dari sektor pendapatan maupun belanja. Namun Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 memutuskan untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga pada tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan perubahan postur APBN dari tahun sebelumnya. Rincian APBN ditunjukkan pada Lampiran 4.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung mendapatkan alokasi belanja APBN sebesar Rp11.238.947.386,00 (dalam ribuan rupiah) yang akan dialokasikan ke seluruh kantor vertikal di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan salah satu kantor vertikal di bawah Mahkamah Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus sengketa, di tingkat banding, memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa;
2. memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa dalam hal dilakukan upaya banding administratif dan;
3. melakukan pengawasan jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pengadilan Tata Usaha Negara juga memberikan pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan wewenang serta perannya dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, penulis tertarik menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai objek penelitian karena PTUN memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang diperoleh pada Masa Pandemi Covid-19 melalui Laporan Keuangan termasuk LRA setiap tahunnya dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir **“Penerapan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Anggaran hingga Aspek Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan Akuntansi Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?
2. Bagaimana pengukuran dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 dan 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selama pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*?
3. Bagaimana pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* mempengaruhi terhadap realisasi anggaran DIPA 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?
4. Bagaimana perbandingan realisasi DIPA 2020 dibandingkan dengan besaran realisasi anggaran DIPA 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?

5. Bagaimana penyajian atas Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengakuan akuntansi anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
2. mengetahui sejauh mana pengaruh pandemi *Corona Virus Dieases 2019* (COVID-19) terhadap penyajian dan pengungkapan LRA tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
3. mengetahui sejauh mana pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) berpengaruh terhadap realisasi anggaran DIPA 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. mengetahui sejauh mana pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) berpengaruh terhadap besaran realisasi anggaran DIPA 2020 dibandingkan DIPA 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; dan
5. mengetahui tentang bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas yaitu melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi anggaran, realisasi anggaran serta penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran DIPA tahun 2020 dan DIPA tahun 2021 setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan yang akan dilaksanakan pada periode bulan Desember tahun 2021 sampai Juni tahun 2022. Alasan penulis untuk membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini agar penulis dapat fokus melakukan pembahasan tema terkait perlakuan akuntansi anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selama masa pandemi *Corona Virus Dieases 2019 (COVID-19)*.

1.5 Manfaat Penulisan

Bagian ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Manfaat penulisan dapat ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang permasalahan dan alasan memilih topik karya tulis tugas akhir. Penulis juga memaparkan rumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup dari penulisan karya tulis tingkat akhir ini. Selain itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data untuk dilakukan peninjauan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II, penulis memaparkan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Teori ini menjadi dasar penulisan yang akan penulis bahas dalam bab pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III, penulis memaparkan hasil pembahasan topik karya tulis, yaitu tinjauan atas Laporan Realisasi Anggaran di masa pandemi pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan. Penulis juga akan memaparkan tentang profil kantor, visi misi dan metode pengumpulan data. Hasil pembahasan ini didasarkan pada landasan teori dan tinjauan atas anggaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 dan anggaran tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian penutup dari karya tulis tugas akhir. Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan atas penelitian dan analisa yang dilakukan, yaitu penerapan akuntansi anggaran dan realisasi anggaran hingga aspek penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.